

BAB III

KONTRIBUSI INDONESIA DI OPEC

Keanggotaan OPEC terbuka bagi setiap negara yang mengekspor minyak mentah dan memiliki kepentingan yang sama dengan organisasi termasuk dengan lima negara pendiri, yakni: Iran, Iraq, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Keikutsertaan Indonesia dalam sebuah organisasi internasional pastilah memiliki berbagai motif dan kepentingan tertentu, baik itu kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan nasional lainnya. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan negara berkembang dapat memanfaatkan kiprahnya dalam kancah global untuk mendapatkan berbagai gengsi politik dan posisi tawar yang cukup tinggi di jajaran negara-negara berkembang lainnya khususnya dalam keanggotaan OPEC. Sebagai organisasi produsen minyak internasional yang berpengaruh, OPEC memiliki tujuan untuk kemakmuran negara-negara anggotanya, baik untuk mempertahankan dan menentukan harga minyak maupun untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau negara-negara konsumen. Namun, dibalik berbagai keuntungan yang didapat Indonesia bergabung dengan OPEC ternyata menyisakan berbagai permasalahan yang akhirnya mendorong Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC.

A. Proses Indonesia Bergabung dengan OPEC

Tahun 1960 merupakan sebuah dekade yang cukup penting bagi perjalanan sejarah Indonesia, dimana saat itu di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia sangat anti kapitalis, telah membawa Indonesia memasuki suatu posisi yang tidak berpihak ke blok manapun dan lebih memilih gerakan non blok yang lebih berpihak kepada negara-negara berkembang

yang ingin menentukan masa depannya secara mandiri tanpa ada campur tangan pihak asing sedikitpun terutama barat.

Demi cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang tertuang pada UUD 1945 menekankan bahwa Indonesia mengancam segala bentuk penjajahan di muka bumi. Maka dari itu Indonesia turut serta dalam menegakkan keadilan di muka bumi ini dan terbebas dari segala macam bentuk kolonisasi yang telah merampas hak-hak asasi manusia untuk hidup merdeka, aman, damai dan sejahtera. Sejak merdeka hingga sekarang Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tentu saja setiap tindak tanduk Indonesia harus sejalan dengan itu (Satria, Kebijakan Pemerintah Indonesia Keluar Dari OPEC Tahun 2008, 2009). Guna mencapai kepentingan nasional bangsa Indonesia, politik luar negeri bebas aktif ini tidak terlepas dari konteks dan masalah pada konstelasi politik internasional. Indonesia merasa terpanggil untuk bergabung dan bekerja sama dengan negara berkembang lainnya yang kedepannya dapat menyejahterakan rakyat dan setara dengan bangsa lainnya serta dapat meningkatkan posisi tawar dalam kancah Internasional. Salah satu jalan untuk mewujudkan hal tersebut adalah bergabung dengan sebuah organisasi internasional yang cukup bergengsi dan diakui keberadaannya.

Dua tahun pasca terbentuknya OPEC, pada tahun 1962 Indonesia menyatakan bergabung dengan OPEC. Pada waktu itu memang sudah mulai mengeksport minyak dan memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara yang telah bergabung dengan OPEC lebih awal (*founder member*). Indonesia memandang momen ini sangat tepat untuk bersatu dengan negara berkembang lainnya yang juga merupakan produsen minyak sebagai bentuk perjuangan dalam melawan kekuatan besar negara-negara industri maupun perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai dan memonopoli produksi hingga pendistribusian minyak secara sepihak.

Bergabungnya Indonesia dengan organisasi kartel minyak internasional ini disambut baik oleh mayoritas negara pendiri dengan penuh antusias. Bagaimana tidak ? pada dekade tersebut jumlah produksi minyak mentah jauh lebih besar dari jumlah konsumsi didalam negeri yaitu sekitar 1,6 juta barrel per hari, sementara kebutuhan minyak untuk dalam negeri hanya sekitar 1 juta barrel per hari (Budiarto, 2008). Disamping itu, Indonesia sangat membutuhkan informasi mengenai teknik perdagangan internasional yang berkaitan dengan ekspor minyak bumi, hal ini membuktikan bahwa Indonesia pada waktu itu sebagai negara *net-exporter* minyak memang layak menjadi anggota OPEC.

B. Peran Indonesia di OPEC

Suatu negara yang terlibat dalam sebuah organisasi tentu tidak hanya sekedar bergabung menjadi anggota, akan tetapi negara tersebut harus membuktikan kelayakannya dalam organisasi yang diikutinya. Demikian pula dengan keterlibatan Indonesia dalam OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*).

Saat ini OPEC telah berusia 56 tahun lebih. Indonesia adalah salah satu anggota penuh (*full member*) terlama diluar negara pendiri (*founder member*). Secara organisasi, keanggotaan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjalanan dan perkembangan OPEC (Buletin Info, 2017). Indonesia telah menjadi saksi dengan merasakan suka duka organisasi ini dan telah memainkan peran penting sebagai mediator yang menonjol. Hal ini dibuktikan secara nyata yaitu pada saat Presiden Konferensi OPEC dijabat oleh Prof. Subroto periode 31 Oktober 1984-9 Desember 1985. Setelah itu, beliau terpilih menjadi Sekretaris Jenderal OPEC selama dua periode (1988-1991 dan 1991-1994).

Terpilihnya Prof. Subroto sebagai Sekjen OPEC dilatar belakangi oleh ketegangan antara negara-negara

anggota OPEC sendiri, terutama karena terjadinya konflik Iraq-Iran pada tahun 1980-1988. Konflik ini memang tidak ada hubungannya secara langsung dengan keberadaan OPEC, tetapi pada waktu itu yang menjabat sebagai Sekjen OPEC berasal dari Iraq (GEOMAGZ Majalah Geologi Populer, 2015). Adapun beberapa pemicu terjadinya konflik Iraq-Iran, mulai dari Ideologi, hegemoni wilayah, situasi geopolitik kawasan, dan faktor ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah perebutan jalur dagang di Semenanjung Arab (*Shatt al-Arab waterway*). Jalur ini menjadi sengketa karena merupakan wilayah strategis yang menjadi pintu utama lalu lintas perdagangan menuju Eropa dan kawasan sekitarnya (Mearsheimer, 2016).

Dalam kerangka keanggotaannya di OPEC, Menteri Subroto sebagai wakil Indonesia menaruh perhatian sangat tinggi terhadap perkembangan pasar minyak bumi, sikapnya yang senantiasa waspada dan teliti diharapkan pasar minyak dunia dapat memberikan manfaat yang seimbang antara negara produsen dan negara konsumen, hal tersebut telah menjadikan Indonesia lebih dikenal sebagai mediator antara produsen dan konsumen minyak. Sikap Prof. Subroto yang senantiasa seimbang dalam menghadapi pertentangan yang keras antara negara-negara anggota OPEC (misalnya konflik Arab Saudi-Iran, negara-negara Teluk yang bersikap moderat) menyebabkan para pemimpin negara-negara anggota OPEC yang lain semakin meyakini bahwa Subroto merupakan figur teladan yang penuh kearifan dalam menangani berbagai kontroversi antar negara anggota OPEC (GEOMAGZ Majalah Geologi Populer, 2015).

Dalam kapasitasnya sebagai Sekjen OPEC yang dijabatnya selama dua periode, Prof. Subroto telah meraih berbagai pencapaian sekaligus menjadi bukti bahwa peran Indonesia dalam OPEC sangat besar. Pertama, mendamaikan berbagai ketegangan antara negara-negara anggota OPEC. Dengan penuh kesabaran, Subroto berhasil membuat

kesepakatan diantara mereka dengan mengingatkan bahwa sasaran bersama yang jauh lebih penting bagi sesama anggota OPEC. Kedua, dibangunnya hubungan antara OPEC dengan negara-negara pengekspor minyak non-OPEC, seperti Meksiko, Norwegia, Inggris, dan Uni Soviet. Ketiga, ditegakkannya hubungan antara OPEC dengan negara-negara pengimpor minyak bumi, baik negara-negara industri (Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa) maupun negara-negara berkembang (India, Brasil, Ghana). Selain itu, Subroto juga berusaha menjalin komunikasi antara Sekretariat OPEC dengan pusat *International Energy Agency* (IEA) yang terletak di Paris yang didirikan oleh negara-negara industri.

Itulah keberhasilan Prof. Subroto dalam upaya membangun dan memperkuat jaringan informasi yang efektif sehingga sidang para menteri OPEC memperoleh banyak informasi yang lebih lengkap dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pada informasi yang lebih tangguh (GEOMAGZ Majalah Geologi Populer, 2015). Terpilihnya Subroto sebagai Presiden Konferensi OPEC pada tahun 1984-1985, kemudian kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal OPEC selama dua periode yaitu pada tahun 1988-1991 dan 1991-1994 telah menjadikan dirinya sebagai pejabat Indonesia yang mengemban jabatan terlama dalam sejarah OPEC.

Peran keanggotaan Indonesia dalam OPEC mencapai puncaknya pada tahun 2004. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgiantoro terpilih menjadi Presiden OPEC dan Sekjen OPEC, dalam suasana harga minyak yang melambung tinggi berhasil membawa OPEC untuk melakukan usaha menurunkan harga minyak dengan tiga kali menaikkan tingkat produksi. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar dan merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara, menjadi aset penting bagi OPEC. Dalam anggaran dasar (*Statute*) OPEC dinyatakan secara tegas bahwa anggota penuh (*full member*) OPEC adalah yang sudah mendapat keanggotaan dengan persetujuan anggota-anggota

penuh lainnya tanpa mempersoalkan apakah negara yang bersangkutan masih *net-exporter* atau bukan, nilai politis ini tentu dianggap jauh lebih besar dari sekedar permasalahan status ekspor minyak Indonesia (Rahman, 2014).

Bagi negara-negara anggota OPEC lainnya, Indonesia merupakan negara yang mampu menjadi penyeimbang diantara banyaknya kepentingan dalam OPEC guna mendorong kompromi sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting yang sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC, terdapat peran yang hilang dan peran tersebut hanya dapat diemban oleh Indonesia.

C. Keuntungan Indonesia Bergabung dengan OPEC

Indonesia bergabung dengan OPEC pada tahun 1962, pada waktu itu sudah mulai mengekspor minyak sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan negara anggota OPEC lainnya. Kehadiran OPEC disambut baik oleh Indonesia, dengan memandang OPEC sebagai suatu perjuangan negara ketiga yang anggotanya didominasi negara berkembang tentu akan mendatangkan berbagai manfaat dan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Adanya jaminan atas stabilitas harga pada tingkat yang layak selain memberikan sumber dana yang signifikan bagi anggaran belanja negara, juga untuk kestabilan anggaran itu sendiri. Misalnya dari segi ekonomi, Indonesia sangat menikmati kenaikan harga minyak dari US\$ 2 per barel menjadi US\$ 12 pascaembargo minyak perang Arab-Israel tahun 1974 (Rahman, 2014). Kenaikan harga tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sangat membantu pembangunan dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan OPEC sebagai wahana untuk mencapai kepentingan nasional, diantaranya untuk mengamankan sumber pasokan minyak Indonesia;

menstabilkan dan mempertahankan harga minyak, gas dan batu bara yang layak; kerja sama ekonomi dan investasi; mendukung diplomasi luar negeri; kerja sama pengembangan teknologi; dan pemanfaatan hasil kegiatan sekretariat OPEC.

1. Pengamanan sumber pasokan minyak Indonesia

Menurunnya jumlah produksi minyak di negara-negara non-OPEC telah menjadi gejala global, termasuk Indonesia yang ikut terkena dampaknya. Selama dua dekade terakhir lapangan-lapangan minyak raksasa tidak ditemukan lagi. Berbeda dengan yang terjadi di negara-negara non-OPEC, justru yang terjadi di negara-negara OPEC Timur Tengah selama dua dekade terakhir menunjukkan perkembangan cadangan minyak dunia semakin bertambah signifikan, yaitu meningkat sebesar 90% (dari 475 miliar barrel tahun 1983 menjadi 905 miliar barrel pada akhir tahun 2006), hal ini akan membuat OPEC lebih dominan di masa yang akan datang.

Adapun negara dan beberapa kawasan baik anggota maupun non-OPEC yang mengalami kelebihan minyak alias eksportir, yakni Timur Tengah, Rusia serta sedikit wilayah di Afrika dan Amerika Latin. Timur Tengah yang juga merupakan kawasan dominasi negara-negara pendiri OPEC, menjadi tujuan semua negara kawasan Asia, Eropa dan Amerika untuk mengamankan masa depan pasokan minyaknya. Mereka menyadari bahwa pengamanan dan stabilitas pasokan energi tidak dapat hanya diandalkan kepada kekuatan dan mekanisme pasar, semuanya merupakan cerminan politik dan diplomasi energi mereka terhadap negara-negara pemilik minyak di Timur Tengah (Rahman, 2014).

Untuk kepentingan jangka panjang, Indonesia harus mengamankan sumber pasokan minyak dan gas guna mencukupi kebutuhan dalam negeri. Usaha yang dilakukan

adalah meningkatkan cadangan terbukti dan jumlah produksi melalui peningkatan investasi dan kegiatan eksplorasi. Menurut prediksi pada cetak biru Pengelolaan Energi Nasional (PEN), bahwa hingga 20 tahun ke depan Indonesia masih akan mengandalkan minyak sebagai sumber energi (MESDM, 2006). Keadaan tersebut menuntut Indonesia mau tidak mau untuk mencari dan mengembangkan sumber-sumber minyak di luar negeri melalui perusahaan nasional yang ada. Dalam usaha ini, Indonesia harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan negara-negara anggota OPEC karena dengan demikian dapat dijadikan aset yang baik. Kawasan Timur Tengah adalah sala satu tujuannya. Contoh adalah diperolehnya konsesi lapangan minyak di Irak bagi Pertamina, kerja sama patungan dengan perusahaan Iran untuk mengelola produksi minyak disatu kawasan yang ada di Iran. Pertamina juga sudah memperoleh wilayah kerja di Libya dan Qatar.

2. Menstabilkan dan mempertahankan harga minyak, gas dan batu bara yang layak

Saat ini jumlah ekspor minyak Indonesia sudah tidak signifikan, bahkan sejak tahun 2003, Indonesia sudah dianggap sebagai negara importir bersih (*net-importer*). Namun, disamping minyak Indonesia masih sebagai eksportir besar gas bumi dan batu bara, sehingga Indonesia tetap memiliki kepentingan pada stabilitas dan harga yang layak atas minyak mentah yang secara langsung akan menentukan harga gas dan batu bara.

3. Kerja sama ekonomi dan investasi

Indonesia dapat memanfaatkan beberapa negara anggota OPEC yang memiliki dana cukup besar untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan mengembangkan investasi mereka dengan menawarkan proyek-proyek investasi menarik. Contohnya proyek pembangunan kilang minyak di Banten bersama Iran, rencana kilang baru di Tuban bersama

Arab Saudi, dan pembangunan resort di Lombok dengan investor dari Uni Emirat Arab.

Sebaliknya, Indonesia juga memiliki peluang pada bidang tenaga kerja profesional di luar negeri. Salah satu contoh adalah dipakainya tenaga terampil dan ahli Indonesia di Qatar dan negara-negara Teluk lainnya. Dalam hal ini, sebaiknya lembaga-lembaga pelatihan baik milik pemerintah maupun swasta harus dapat membina tenaga kerja berkualitas lebih banyak demi memaksimalkan peluang yang ada.

4. Mendukung diplomasi luar negeri

Dalam politik luar negeri sangat diperlukan adanya dukungan terhadap diplomasi Indonesia melalui kerja sama internasional. Sejak bergabung menjadi anggota OPEC, posisi tawar Indonesia dalam kancah internasional semakin meningkat karena keberadaan OPEC diantara organisasi-organisasi negara berkembang lainnya sangat disegani, negara-negara anggota OPEC terkenal memiliki solidaritas diplomasi yang tinggi. Keanggotaan Indonesia sendiri dipandang sebagai negara yang selalu menjaga solidaritas OPEC (Direktur Komoditi dan Standardisasi, 2005), sehingga dalam hal ini sering dimanfaatkan oleh Indonesia dalam diplomasinya menghadapi permasalahan nasional, seperti HAM dan integritas nasional.

Seiring perjalanannya, perkembangan OPEC semakin meluas ke arah masalah-masalah kemanusiaan. Usaha yang dilakukan dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan membentuk OPEC *Fund* yang sekarang sudah berganti nama menjadi OPEC *Fund for International Development* (OFID), yaitu organisasi yang menyediakan dana untuk membantu negara-negara berkembang non-OPEC dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan terutama pada infrastruktur, perlindungan lingkungan di bidang energi dan pertanian, serta penekanan pada kebutuhan negara-negara

miskin melalui pendidikan dan kesehatan (OFID, 2017). Indonesia dapat memanfaatkan OPEC *Fund* ini sebagai sarana untuk memperkuat diplomasinya, hal ini dapat diwujudkan dengan membantu negara tetangga seperti Papua Nugini atau Timor Leste untuk memperoleh dana OPEC *Fund* tersebut.

5. Kerja sama pengembangan teknologi

Selain pada bidang ekonomi dan politik, OPEC juga membina kerja sama riset teknologi antar negara anggota yang hasilnya dapat dinikmati dengan biaya relatif murah karena ditanggung bersama. Dalam hal ini, pihak Indonesia melalui Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS) sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ikut berkoordinasi dengan Sekretariat OPEC.

6. Pemanfaatan hasil kegiatan sekretariat OPEC

Lebih dari 70% personil Sekretariat OPEC merupakan para peneliti profesional, beberapa diantaranya terdapat tenaga ahli perwakilan Indonesia yang mendapat kesempatan untuk berkiprah di Sekretariat OPEC. Oleh karena itu, hampir 80% aktivitas Sekretariat OPEC adalah kegiatan studi dan riset yang berwawasan global seperti riset pasar dan harga minyak yang bersifat jangka pendek dan menengah, sedangkan untuk kegiatan studi-studi energi adalah bersifat jangka menengah dan panjang.

Indonesia sebagai anggota OPEC berhak mendapatkan akses penuh atas semua hasil kegiatan riset dan studi sekretariat, baik berupa data dan informasi, maupun hasil penelitian berupa laporan konfidensial maupun publikasi. Hasil riset dan studi tersebut dapat dimanfaatkan dalam melakukan kajian yang sesuai dengan kepentingan Indonesia yang berkaitan dengan aspek global.

D. Kondisi Indonesia ketika Keluar dari OPEC

Pada sidang konferensi OPEC ke-171, Indonesia menarik diri keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini dilatar belakangi oleh kebijakan OPEC yang meminta negara anggotanya untuk memotong kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Saat ini status Indonesia sudah berubah dari *net-exporter* menjadi *net-importer*, sehingga kebijakan tersebut telah menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dan OPEC. Posisi Indonesia sebagai *net-importer* minyak mentah telah memunculkan ketidakcocokan dengan negara-negara anggota OPEC lainnya yang memang sebagai *net-exporter*. Kendati keluar, namun kebijakan yang diambil Indonesia bukan keluar sepenuhnya. Lebih tepatnya status keanggotaan Indonesia adalah disuspensi (penangguhan sementara). Kebijakan ini adalah cara terbaik bagi Indonesia karena menyesuaikan dengan dinamika kepentingan dalam negeri.

Dalam statusnya diluar keanggotaan OPEC, Indonesia tetap bisa menjalin hubungan baik dengan OPEC, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan sejumlah negara anggota OPEC yang notabene memiliki 70% cadangan minyak dunia. Selain itu, Indonesia tetap dapat menawarkan perannya dalam rangka stabilisasi pasar minyak dunia, diantaranya sebagai jembatan antara OPEC dan negara-negara berkembang. Perlu diketahui bahwa keluarnya Indonesia tidak diharapkan dan sangat disayangkan oleh OPEC karena Indonesia merupakan salah satu anggota terlama yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan dan perkembangan OPEC. Meskipun Indonesia merupakan anggota penuh, akan tetapi secara *de facto* sudah dianggap setara dengan anggota pendiri (Rahman, 2014).

Ketergantungan dunia kepada minyak OPEC akan semakin besar. Dalam jangka panjang, Indonesia akan membutuhkan tambahan pasokan impor minyak mentah yang

kini tidak dapat diperoleh jika hanya mengandalkan pendekatan bisnis. OPEC tetap menjadi sasaran utama diplomasi Indonesia di bidang energi. Meskipun Indonesia bukan lagi sebagai anggota, namun kedekatan Indonesia dengan OPEC telah meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berkompetisi dengan negara-negara konsumen lainnya yang mengiming-iming dana investasi, teknologi ataupun peralatan pertahanan demi mendapatkan pasokan minyak dari negara-negara anggota OPEC. Saat ini negara-negara konsumen minyak dalam menjalin kerja sama bilateral energi dengan negara produsen selalu menempatkan kepentingan lainnya diatas kerja sama tersebut, seperti kerja sama di bidang ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, dengan status berada diluar keanggotaan OPEC, sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk memelihara dan meningkatkan kedekatan dengan negara-negara anggota OPEC.

Kebijakan pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk lebih menyadarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita bukan lagi negara kaya dengan minyak yang berlimpah. Sebagai alternatif, Indonesia harus menggalakkan efisiensi pemakaian energi dan mendayagunakan semua sumber daya energi lain yang dimiliki. Selanjutnya Indonesia harus lebih aktif dalam forum energi lain, seperti *International Energy Forum* (IEF), bekerja sama dengan lembaga-lembaga energi seperti *International Energy Agency* (IEA) maupun dengan OPEC sendiri. Dalam tingkat regional, Indonesia perlu melakukan kerja sama energi dalam ASEAN dan APEC demi memperkuat keamanan energi dalam negeri (Suara Karya, 2008).

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC tentu memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah Indonesia tidak lagi berkewajiban membayar iuran keanggotaan OPEC sebesar US\$ 2 juta per tahun atau sekitar 30 miliar rupiah. Jumlah tersebut dapat dikatakan cukup besar,

dengan demikian Indonesia dapat menghemat APBN pemerintah. Dampak positif lainnya adalah tidak lagi terikat dengan peraturan dan batasan-batasan yang diberlakukan oleh OPEC. Artinya, Indonesia dapat mengelola sumber daya energinya, khususnya lebih fokus kepada pembenahan persediaan dan permintaan minyak bumi di dalam negeri tanpa terikat regulasi OPEC. Hal ini perlu dilakukan karena cadangan minyak Indonesia semakin berkurang sehingga cadangan minyak yang dihasilkan dapat dikelola secara domestik dan dapat menjadi cadangan energi minyak jangka panjang.

Sedangkan dampak negatif keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC dapat dikatakan tergolong kecil dan tidak berpengaruh secara signifikan khususnya terhadap perekonomian Indonesia, mengingat kebijakan serupa pernah dilakukan, yaitu pada tahun 2008 Indonesia juga pernah keluar dari OPEC. Untuk saat ini kebijakan keluar dari keanggotaan OPEC merupakan suatu keputusan yang memang tepat bagi Indonesia demi memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, Indonesia juga masih tetap menjalin hubungan baik dengan OPEC maupun menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara anggota OPEC. Sehingga kerja sama pada bidang ekonomi dan investasi dengan negara-negara anggota OPEC masih utuh terjaga.